

PEMBIAYAAN DAN POTENSI KREDIT BERMASALAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI INDONESIA

Imron Rosyadi¹⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: imron.ums@ac.id

Abstract

Research goal is to analyze and explain the development of Financing of Islamic Rural Bank industry in Indonesia based on the items of financing, economic sector, type of usage, the financing account and the amount of financing and how to analyze and decipher large potential bad debts in the Financing of Islamic Rural Bank industry in Indonesia. The research is taking Financing of Islamic Rural Bank in Indonesia as a research subject, as well as population and samples of this research. Sources of data that is needed is the secondary data obtained from the Syariah Banking Statistics published by the Directorate of Bank Indonesia Financing of Islamic Rural Bank period March 2012 - February 2015, with the publication of financial reports perquarter. Results of this research showed that Financing of Islamic Rural Bank assets from year to year has increased significantly, but, its share is still relatively small; financing provided Financing of Islamic Rural Bank showed a significant increase, but its share of total Bank in Indonesia is still very small or not showed a rapid growth.; financing the most distributed in the Syariah Banking scheme murabahah financing receivables and receivables smallest istishna' Bank Syariah not contribute movement in the optimal investment in Indonesia, even tendency share of consumption continue to move quickly in the years to come; Financing of Islamic Rural Bank contribute relatively large movement in the real sector in Indonesia through a loan that is used to increase capital, performance and productivity sectors UKM; source of funds (deposit fund) Financing of Islamic Rural Bank from year to year continue to increase significantly, but the share of funds to Bank Syariah total source of funds in Bank Indonesia is still very small or very small growth; and the ratio NPFs achieved Banking Sharia can be categorized in groups to perform better (healthy) associated with the financing provided.

Keyword: financing, non-performing financings, financing deposit to ratio

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah dewasa ini semakin populer tidak hanya di negara-negara Islam, tetapi juga di Negara-negara Eropa. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya bank-bank menerapkan konsep syariah. Melihat perkembangan itu, tidak tertutup kemungkinan pada masa mendatang seluruh aspek perekonomian akan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan nilai-nilai Islam dapat diterima di berbagai kalangan karena sifatnya yang universal dan tidak eksklusif.

Nilai-nilai itu, misalnya keadilan dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha. Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya, BMI belum mendapatkan perhatian yang luas. Dalam perjalanannya, terutama sejak MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank, bank berbasis Syariah bermunculan yang diikuti dengan munculnya lembaga keuangan berbasis

syariah lainnya, seperti asuransi syariah, walaupun belum menjamur seperti bank syariah.

Bank Indonesia (2008) mencatat hingga Februari 2008 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) tidak mengalami peningkatan, tetapi jumlah Usaha Unit Syariah (UUS) meningkat menjadi 28. Satu dekade kemudian, yakni sampai April 2016 terdapat 12 BUS, 32 UUS (SPS OJK, 2016). Demikian juga dengan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam delapan tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yakni dari 114 BPRS pada Februari 2008, menjadi 165 BPRS pada April 2016. Seiring dengan meningkatnya jaringan kantor bank, pada periode 2015-2016, industri keuangan ini mengalami peningkatan volume usaha (aset) cukup signifikan, dari Rp.269,467 triliun pada April 2015 menjadi Rp 297,377 triliun pada April 2016. Sementara pangsa BPRS mencapai tiga persen dengan nilai aset sekitar Rp.68 trilyun hingga Rp.80 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BUS juga meningkat dari Rp.213,973 triliun pada April 2015 menjadi Rp.233,808 triliun pada April 2016. Kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan yang diberikan (PYD) BPRS juga meningkat dari Rp 53,26 triliun pada Maret 2015 menjadi Rp 61,33 triliun pada April 2016. Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar pembiayaan masih terfokus pada tiga jenis pembiayaan, yakni piutang mudharabah 59,24 persen, pembiayaan mudharabah 19,96 persen, dan pembiayaan musyarakah sebesar 15,77 persen. Pertumbuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi dalam kondisi sektor riil yang kurang kondusif akibat meningkatnya tekanan inflasi, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah atau *non-performing loans (NPL)* (SPS OJK, 2016).

SPS OJK (2015) juga mencatat bahwa pada April 2015 *Non Performing Financing (NPF)* BPRS bertahan pada level yang tergolong tinggi, yakni rasio *NPF (gross)* sebesar 9,33 persen. Sementara pada 2016 meningkat menjadi 9,51 persen. Sementara dari sisi profitabilitas, pada 2015 BPRS mampu mencatatkan tingkat keuntungan Rp.405,95 miliar, menurun menjadi Rp.378,62 miliar pada 2016. Sejalan dengan peningkatan profitabilitas ini, rasio

keuntungan terhadap aset yang dikelola meningkat dari 1,35 persen pada 2015 menjadi 1,78 persen tahun 2016.

Setidaknya ada tiga faktor pemicu pertumbuhan ini. Pertama, masuknya beberapa bank umum syariah (BUS) baru, kedua, pesatnya bisnis BUS lama, dan ketiga, terpenuhinya target peningkatan bisnis Unit Usaha syariah (UUS) sekitar 40 unit. Kondisi BPRS Syariah pada tahun mendatang diperkirakan akan terus membaik. Ini terbukti dengan masih tingginya minat masyarakat terhadap BPRS Syariah. Dalam rangka peningkatan jangkauan melalui kemudahan untuk membuka kantor pelayanan, diharapkan dapat memberikan pengaruh pada minat masyarakat. Di sisi lain, secara internasional peluang memanfaatkan investasi asing, khususnya dari Timur Tengah ke dalam sistem perekonomian Indonesia masih terbuka lebar.

Industri keuangan syariah secara internasional menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi yang memberikan peluang besar bagi sistem keuangan syariah (Ismal, 2008). Harapan dapat menerbitkan sukuk menjadi semakin besar dengan minat pemerintah menerbitkan global sukuk berdenominasi valuta asing. Hal ini berpotensi meningkatkan variasi instrumen keuangan syariah yang akan sangat berguna bagi likuiditas sistem keuangan syariah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya minat masyarakat, BPRS menghadapi tantangan besar.

Dalam usia relatif muda, setidaknya ada tiga tantangan besar BPRS. *Pertama*, ujian atas kredibilitas sistem perbankan berbasis syariah di kancah perbankan nasional. *Kedua*, bagaimana BPRS memainkan peran strategisnya dalam menggerakkan sektor riil di Indonesia. *Ketiga*, Pangsa pasar BPRS relatif kecil yaitu sekitar 1,85 persen dari industri perbankan nasional (Direktorat BPR Syariah BI, 2015)

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (i) Untuk menganalisis dan menjelaskan Perkembangan pembiayaan BPRS di Indonesia; (ii) Untuk menganalisis dan menguraikan seberapa besar potensi kredit bermasalah BPRS di Indonesia dan (iii) Untuk mengetahui dan menguji pengaruh BBM, tariff listrik dan upah terhadap *NPL*

2. KAJIAN LITERATUR

BPR Syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah.

BPR Syariah terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPR Syariah memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan dan deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

Prinsip syariah dalam BPR Syariah diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPR Syariah mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPR Syariah. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPR Syariah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPR Syariah. Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPR Syariah memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPR Syariah. Selain itu, BPR Syariah juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Penilaian pendekatan kuantitatif terhadap faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*financing to deposit ratio—FDR*) (Budisantoso dan Triandaru, 2005).

Non Performing Financings (NPF)

Penilaian pendekatan kuantitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap perkembangan aktiva produktif bermasalah (*nonperforming asset*) dibandingkan aktiva produktif (Budisantoso dan Triandaru, 2005).

3. METODE PENELITIAN

Setting penelitian ini mengambil BPRS di seluruh Indonesia sebagai subjek penelitian, sekaligus sebagai populasi dan sampel penelitian ini. Sumber data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik BPR Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia periode Maret 2004 – Februari 2008, dengan periode publikasi laporan keuangan per-triwulan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data arsip (*archival*) yaitu teknik pengumpulan data di basis data (Jogiyanto, 2006)

Definisi Operasional dan Pengukurannya

Sekaran (2006); Jogiyanto (2003) menyatakan bahwa pengoperasionalan konsep (*operationalizing the concept*) atau disebut dengan mendefinisikan konsep secara operasi adalah menjelaskan karakteristik dari obyek (properti) kedalam elemen-elemen (elements) yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan di dalam riset.

Konsep secara operasi yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah:

- (a) *Items of financing* adalah komposisi pembiayaan yang terdiri dari: (i) pembiayaan musyarakah; (ii) pembiayaan mudharabah; (iii) piutang murabahah; (iv) piutang salam; dan (v) piutang istishna'. *Item of financing* diukur berdasarkan besarnya nilai (juta rupiah) pembiayaan untuk lima (5) item tersebut dan pangsa (*share*) dari seluruh item pembiayaan;
- (b) Jenis penggunaan adalah pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan yang terdiri dari: (i) modal kerja; (ii) investasi dan;

- (iii) konsumsi. Jenis penggunaan diukur berdasarkan besarnya nilai (juta rupiah) pembiayaan untuk tiga jenis pembiayaan tersebut;
- (c) Golongan pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan yang terdiri dari: (i) UKM (*small and medium business*) dan (ii) non UKM. Golongan pembiayaan diukur berdasarkan besarnya nilai (juta rupiah) pembiayaan untuk tiga (3) golongan pembiayaan tersebut;
- (d) Potensi kredit macet (aktiva produktif bermasalah) adalah kemungkinan (prosentase) terjadinya pembiayaan tidak lancar, yang biasanya diukur dengan rasio *non performing financing (NPF)*

Alat Analisis

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* yaitu menjelaskan fenomena perkembangan pembiayaan bank syariah yang kemudian dikaitkan potensi kredit macet-nya, serta menjelaskan peran strategis bank syariah dalam menggerakkan sektor riil di Indonesia. Penjelasan (*explanatory*) dilakukan berdasarkan data-data mengenai pembiayaan dan NPL yang dipublikasikan oleh Direktorat BPR Syariah BI melalui “Statistik BPR Syariah”.

Alat analisisnya menggunakan analisis deskriptif-analitik yaitu melakukan pengamatan (*compare*) terhadap perkembangan data statistik tentang pembiayaan setiap tri-semester periode 2007-2008. Perkembangan pembiayaan yang diamati dapat dikategorikan berdasarkan *items of financing*, sektor ekonomi, jenis penggunaan, golongan pembiayaan dan jumlah rekening pembiayaan.

Untuk menganalisis adanya potensi kredit macet dilakukan pengamatan (*compare*) terhadap perkembangan *FDR* dan *NPL* setiap tri-semester periode 2006-2008. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh BBM, tariff listrik dan upah terhadap *NPL* digunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regressions*).

4. HASIL PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Proses penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu peneliti terhadap perkembangan pembiayaan (kredit) dan potensi kredit bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPR Syariah). Untuk menemukan jawaban atas keingintahuan tersebut didesain penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang sudah dicanangkan di awal bab laporan penelitian ini, yaitu melakukan pengumpulan data perkembangan pembiayaan dan sumber dana BPR Syariah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan observasi atas data-data tersebut. Setelah observasi dilakukan pengolahan data untuk menemukan nilai rata-rata hitung dan *share* (prosentase) pembiayaan per-triwulan per-tahun dalam lima tahun terakhir, kemudian diamati dan analisis perkembangannya dari tri-wulan ke tri-wulan berikutnya.

Kemudian untuk melihat seberapa besar BPR Syariah menjalankan fungsi intermediasi dan potensi kredit macet, dilakukan pengamatan dan analisis pada perkembangan rasio kredit terhadap sumber dana (*financing to deposit ratio/FDR*) dan pembiayaan non-lancar (*non-performing financings/NPFs*).

Perkembangan Aset

Tabel 1. menunjukkan perkembangan aset industri BPR Syariah dalam triwulan-an. Perkembangan aset BPR Syariah dari tahun ke tahun (*yoy*) menunjukkan peningkatan dan atau pertumbuhan aset yang signifikan. Pada tahun 2012 rata-rata aset BPR Syariah per-triwulan sebesar Rp.585.467 Juta. Pangsa (*share*) aset terbesar pada tahun 2012 adalah pembiayaan yang diberikan (*financing extended*) yaitu sebesar 71,27% dari total aset yang dimiliki BPR Syariah. Sementara pada tahun 2006 aset BPR Syariah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti yaitu menjadi rata-rata per-triwulan sebesar Rp.896.017 Juta. *Extended financing* masih merupakan pangsa yang terbesar yaitu 68,69% dari total aset yang dimiliki oleh BPR Syariah, menurun relatif sangat kecil yaitu sebesar 2,58% dari posisi tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2014 aset BPR Syariah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu menjadi Rp.1.066.955 Juta rata-rata per-triwulan atau meningkat sebesar 16,02% dari posisi tahun 2013. *Share* terbesar masih tetap sama yaitu aset yang berupa pembiayaan yang diberikan yaitu sebesar 73,25% dari total aset yang dimiliki oleh BPR Syariah, meningkat relatif kecil yaitu sebesar 4,56% dari posisi tahun 2012. Terakhir, pada tahun 2015 aset BPR Syariah

mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu menjadi sebesar rata-rata Rp.1.505.212 Juta per-triwulan. Pembiayaan yang diberikan sebesar 76,05% dari total aset yang dimiliki BPR Syariah, meningkat sebesar 2,8% dari posisi 2014. Peningkatan aset yang cukup

besar pada periode Maret - Desember 2015 banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) kenaikan yang cukup besar pada aset *financing extended*; (2) telah berdiri sebanyak 17 BPR Syariah Baru di berbagai daerah.

Tabel 1. Perkembangan Aset BPR Syariah periode 2012-2015 (Juta Rupiah)

	Periode	Nominal
2012	Maret	n.a.
	Juni	n.a.
	September	n.a.
	Desember	n.a.
	Rata-rata	585.467
2013	Maret	n.a.
	Juni	n.a.
	September	n.a.
	Desember	n.a.
	Rata-rata	896.017
2014	Maret	945.005
	Juni	997.254
	September	1.122.663
	Desember	1.202.898
	Rata-rata	1.066.955
2015	Maret	1.295.149
	Juni	1.456.451
	September	1.575.915
	Desember	1.693.332
	Rata-rata	1.505.212

Sumber: Diadaptasi dari Statistik BPR Syariah periode 2012-2015, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Pertanyaan yang sangat krusial adalah seberapa besar *share* BPR Syariah terhadap total BPR di Indonesia? Tabel 2. menunjukkan pangsa (*share*) BPR Syariah terhadap total BPR di Indonesia. *Share* BPR Syariah terhadap total BPR di Indonesia belum menunjukkan angka yang signifikan atau sangat kecil. Posisi Januari 2015 menunjukkan *share* sebesar 4,19% terhadap total BPR, dengan rincian nominal sebesar untuk Rp.1.227 Miliar untuk BPR Syariah dan Rp.28.054 Miliar untuk total BPR di Indonesia. Sementara posisi Oktober 2015 *share* BPR Syariah terhadap

total Bank meningkat tidak signifikan sebesar 0,61% dari posisi Januari 2015, dengan rincian nominal Rp.1,611 Miliar untuk BPR Syariah dan Rp33.574 Miliar untuk total BPR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai akhir 2015 *share* BPR Syariah masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan total BPR di Indonesia, sehingga prediksi para pengamat, pegiat dan atau praktisi BPR Syariah bahwa *share* BPR Syariah pada tahun 2015 mencapai 5% dari total BPR tidak sesuai dengan kenyataan.

Tabel 2. Pangsa BPRS Terhadap Total BPR di Indonesia

	Total Aset	Deposit Fund	Financing Extended	
Januari 2015	Nominal (Miliar Rp.)	1,227	730	879
	<i>Share</i> (%)	4,19	3,68	4,04
	Total BPR (Miliar Rp.)	28.054	19.138	20.893
Oktober	Nominal (Miliar Rp.)	1.611	914	1.260

2015	Share (%)	4,80	4,21	4,69
	Total Bank (Miliar Rp.)	33.574	21.710	26.896

Sumber: Diolah dari Statistik BPR Syariah periode 2005-2008, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Hasil analisis ini mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Karim (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aset BPR Syariah tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan *share* yang sangat kecil jika dibandingkan dengan total Perbankan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) nasabah bank syariah berminat meningkatkan alokasi dana mereka ke bank syariah dan memindahkan kredit konvensional mereka ke bank syariah bila bank syariah dapat memenuhi kebutuhan perbankan mereka sebagaimana yang mereka nikmati dari bank konvensional. Banyak di antara responden yang mempertahankan melakukan transaksi dengan bank konvensional karena bank syariah belum dapat memenuhi kebutuhan perbankan mereka; (2) minat yang tinggi (62,5 persen) dari nasabah yang belum menjadi nasabah BPR Syariah ternyata diikuti dengan persepsi mereka bahwa kualitas layanan BPR Syariah belum dapat memenuhi standar kualitas layanan sebagaimana yang mereka dapatkan di bank konvensional; (3) baik nasabah bank syariah maupun nasabah nonbank syariah sama-sama mempunyai persepsi bahwa bank syariah mempunyai kantor sedikit dan sulit ditemukan (48 persen), jaringan ATM sedikit (32 persen), serta banknya tidak populer (14 persen) dan (4) baik nasabah bank syariah maupun nasabah bank konvensional sama-sama mengharapkan agar bank syariah benar-benar menjalankan prinsip syariah (prioritas pertama), pelayanan yang cepat (peringkat kedua), pelayanan yang ramah (prioritas ketiga), pengelola yang profesional (prioritas keempat), dan pengetahuan pegawai bank syariah tentang produk bank syariah (prioritas kelima).

Perkembangan Pembiayaan

Tabel 3. menunjukkan perkembangan pembiayaan yang diberikan (*extended financing*) BPR Syariah. Perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun (*yoy*) dalam lima tahun terakhir menunjukkan

peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 pembiayaan yang diberikan BPR Syariah rata-rata per-triwulan sebesar Rp.417,282 Juta. Sementara pada tahun 2013 pembiayaan yang diberikan meningkat relatif besar menjadi rata-rata per-triwulan sebesar Rp.615,469 Miliar. Selanjutnya pada tahun 2014 pembiayaan BPR Syariah masih menunjukkan peningkatan yang cukup berarti yaitu menjadi rata-rata per-triwulan sebesar Rp.791,670 Miliar. Terakhir, pada posisi 2008 BPR Syariah membukukan peningkatan *financing extended* yang cukup drastis menjadi rata-rata per-triwulan sebesar Rp.1.144.721 Miliar.

Posisi Januari 2015 pangsa pembiayaan yang diberikan BPR Syariah masih relatif sangat kecil yaitu mencapai 4,04% terhadap pembiayaan yang diberikan total BPR, dengan rincian Rp.879 Miliar untuk BPR Syariah dan Rp.20.896 Miliar untuk total BPR di Indonesia. Sementara posisi Oktober 2015 pangsa pembiayaan BPR Syariah meningkat menjadi 4,69% dengan rincian Rp.1.260 Miliar untuk BPR Syariah dan Rp.26.896 Miliar untuk BPR di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam empat tahun terakhir, Pembiayaan yang diberikan BPR Syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun *share*-nya terhadap total BPR di Indonesia masih sangat kecil atau belum menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Komposisi Pembiayaan (*Item of Financing*)

Tabel 3. menunjukkan perkembangan pembiayaan BPR Syariah berdasarkan *Item of Financing*. Komposisi pembiayaan yang diberikan Perbankan terdiri dari: (i) Pembiayaan Musyarakah; (ii) Pembiayaan Mudharabah; (iii) Piutang Murabahah; (iv) Piutang Salam; (v) Piutang Istishna'; (vi) Piutang Qardh; (vii) Ijarah dan (viii) Lainnya.

Posisi 2012 komposisi pembiayaan, *share* terbesar adalah untuk pembiayaan jenis piutang murabahah yaitu mencapai rata-rata per-triwulan sebesar 80,89% dari

total pembiayaan yang diberikan, urutan berikutnya adalah jenis pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, ijarah, qardh, pembiayaan istishna', dan diurutan terakhir jenis pembiayaan piutang salam dengan *share* secara berurutan rata-rata per-triwulan adalah 9,60%, 5,81%, 1,63%, 1,59%, 0,44% dan 0,02%. Sementara pada tahun 2013 komposisi pembiayaan tidak berubah, *share* terbesar masih tetap ditempati skim pembiayaan piutang murabahah dengan *share* rata-rata per-triwulan sebesar 82,15%, diikuti skim pembiayaan mudharabah sebesar 10,62%, pembiayaan musyarakah 4,28%, qardh 1,62%, ijarah 1,10% dan piutang istishna' 0,22%.

Selanjutnya pada tahun 2014 skim pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat masih tetap skim piutang murabahah, namun proporsi-nya yang relatif menurun sebesar 1,50% dari posisi 2013 dengan *share* menjadi sebesar

81,65%, *share* skim pembiayaan yang lain mengalami peningkatan yaitu pembiayaan mudharabah menjadi sebesar 10,38%, diikuti pembiayaan musyarakah 4,27%, qardh 2,12%, ijarah 0,81% dan piutang istishna 0,77%. Terakhir, posisi November 2008 komposisi pembiayaan BPR Syariah tidak banyak berubah yaitu *share* terbesar masih didominasi skim pembiayaan piutang murabahah dengan *share* rata-rata per-triwulan sebesar 80,56%, kemudian diikuti skim pembiayaan mudharabah 9,33%, pembiayaan musyarakah 4,01%, qardh 2,75%, piutang istishna' 1,79%, multijasa 0,87% serta diurutan terakhir skim ijarah dengan *share* 0,51%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam empat tahun terakhir kredit yang paling besar disalurkan BPR Syariah pada skim pembiayaan piutang murabahah dan terkecil ijarah. Hal ini bisa diprediksikan bahwa di tahun-tahun yang akan datang komposisi pembiayaan BPR Syariah tidak banyak berubah.

Tabel 3. Perkembangan Pembiayaan BPRS Berdasarkan *Item of Financing* Periode 2012-2015

Periode	Nominal (000.000)	Pmusy (%)	Pmudh (%)	Pimur (%)	PiSal (%)	Piist (%)	Pilj (%)	PQ (%)	Mj (%)	
2012	Maret	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Juni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	September	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Desember	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Rata-rata	417.282	9,60	5,81	80,89	0,02	0,44	1,63	1,59	0
2013	Maret	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Juni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	September	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Desember	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Rata-rata	615.469	4,28	10,62	82,15	0,00	0,22	1,10	1,62	0
2014	Maret	679.764	3,88	10,28	82,61	0,00	0,17	0,94	2,11	0
	Juni	744.743	4,31	10,16	82,39	0,00	0,12	0,89	2,12	0
	September	865.250	4,38	10,88	80,57	0,00	1,27	0,80	2,07	0
	Desember	876.921	4,51	10,19	81,01	0,00	1,53	0,59	2,17	0
	Rata-rata	791.670	4,27	10,38	81,65	0,00	0,77	0,81	2,12	0
2015	Maret	951.591	4,29	8,45	81,45	0,00	1,79	0,58	2,68	0
	Juni	1.123.027	4,31	9,63	80,40	0,00	1,64	0,47	2,62	0,91
	September	1.247.657	4,03	10,20	79,87	0,00	1,76	0,53	2,48	1,12
	Desember	1.256.610	3,42	9,02	80,51	0,00	1,96	0,44	3,21	1,43
	Rata-rata	1.144.721	4,01	9,33	80,56	0,00	1,79	0,51	2,75	0,87

Sumber: Diadaptasi dari Statistik BPR Syariah periode 2005-2008, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Keterangan:

- PMusy = Pembiayaan Musyarakah
- PMudh = Pembiayaan Mudharabah
- PiMur = Piutang Murabahah

- PiSal = Piutang Salam
- PiIst = Piutang Istishna'
- Ch = Channeling
- PQ = Piutang Qardh
- PiIj = Piutang Ijarah
- MJ = Multijasa
- L = Lainnya

Jenis Penggunaan (on Type of Use)

Tabel 4. menunjukkan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan. Ada tiga jenis penggunaan pembiayaan yaitu: (i) modal kerja (*working capital*), (ii) investasi (*investment*) dan (iii) konsumsi (*consumption*).

Pada tahun 2012, *share* rata-rata per-triwulan sebesar 56,75% dari total pembiayaan dialokasikan untuk modal kerja, 31,74% untuk konsumsi dan sisanya 11,51% dialokasikan untuk investasi. Selanjutnya pada tahun 2013, *share* rata-rata per-triwulan pembiayaan yang dibelanjakan untuk modal kerja sebesar 58,13%, konsumsi 29,10% dan sisanya 12,77% untuk kredit yang dibelanjakan untuk investasi. Terakhir, pada tahun 2015 proporsi jenis penggunaan pembiayaan tidak banyak berubah dari posisi 2014, secara berurutan adalah modal kerja, konsumsi dan investasi, dengan *share* masing-masing rata-rata per-trisemester sebesar 53,64%, 35,17% dan 11,18%. Modal kerja mengalami penurunan *share* sebesar 2,25%, sementara konsumsi mengalami peningkatan yang relatif besar yaitu sebesar 5,14% dari posisi 2014.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa selama empat tahun terakhir, pembiayaan yang dibelanjakan untuk konsumsi sudah melampaui besarnya pembiayaan yang digunakan untuk investasi.

Proporsi jenis penggunaan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kredit dialokasikan untuk meningkatkan modal kerja usaha dan atau perusahaan. Bagi BPR Syariah, menunjukkan sebagian besar pembiayaan yang diberikan bersifat piutang jangka pendek, sementara pembiayaan yang digunakan untuk investasi dan konsumsi relatif tidak seimbang bahkan ada kecenderungan pembiayaan untuk konsumsi lebih besar dari pembiayaan untuk investasi. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa BPR Syariah belum memberikan kontribusi yang optimal dalam menggerakkan investasi di Indonesia, bahkan ada kecenderungan *share* pembiayaan untuk konsumsi terus bergerak cepat di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia lebih berminat meminjam dana di BPR Syariah untuk membelanjakan konsumsi daripada membiayai proyek-proyek produktif investasinya.

Tabel 4. Perkembangan Pembiayaan BPRS Berdasarkan Jenis Penggunaan periode 2012-2015

	Periode	Nominal (000.000)	Modal Kerja (%)	Investasi (%)	Konsumsi (%)
2012	Maret	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Juni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	September	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Desember	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Rata-rata	417.282	56,75	11,51	31,74
2013	Maret	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Juni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	September	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Desember	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Rata-rata	615.469	58,13	12,77	29,10
2014	Maret	679.764	n.a.	n.a.	n.a.

	Juni	744.743	n.a.	n.a.	n.a.
	September	865.250	n.a.	n.a.	n.a.
	Desember	876.921	n.a.	n.a.	n.a.
	Rata-rata	791.670	55,89	14,08	30,03
2015	Maret	951.591	54,87	12,08	33,04
	Juni	1.123.027	53,69	11,39	34,92
	September	1.247.657	53,11	10,70	36,19
	Desember	1.256.610	52,89	10,56	36,55
	Rata-rata	1.144.721	53,64	11,18	35,17

Sumber: Diolah dari Statistik BPR Syariah periode 2005-2008, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Golongan Pembiayaan (Type of Financing)

Tabel 5. menunjukkan golongan pembiayaan yang diberikan BPR Syariah kepada nasabah. Pembiayaan pada BPR Syariah dibagi menjadi dua golongan (skala) bisnis yaitu: (i) pembiayaan UKM (*small and medium business*) dan (ii) pembiayaan Non-UKM.

Dari tahun ke tahun dalam empat tahun terakhir pembiayaan yang dialokasikan untuk UKM menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 pembiayaan untuk UKM rata-rata per-triwulan sebesar Rp.273.212 atau 65,47% dari total pembiayaan, sedangkan sisanya 34,53% merupakan pembiayaan non-UKM. Selanjutnya pada tahun 2014, pembiayaan yang disalurkan untuk pengembangan usaha/bisnis berskala UKM meningkat menjadi rata-rata per-triwulan sebesar

Rp.575,028 Juta atau dengan *share* sebesar 64,60% dari total pembiayaan, sisanya 35,40% merupakan pembiayaan non-UKM. Terakhir pada tahun 2015 pembiayaan yang disalurkan untuk kelompok bisnis UKM meningkat menjadi rata-rata per-triwulan sebesar Rp.626.657 Juta atau dengan *share* sebesar 55,12% dari total pembiayaan, sisanya 44,88% disalurkan untuk kredit non-UKM.

Proporsi penggolongan pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar (50 persen lebih) pembiayaan disalurkan untuk mengembangkan bisnis berskala UKM. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa BPR Syariah memberikan kontribusi relatif besar dalam menggerakkan sektor riil di Indonesia melalui kredit yang digunakan untuk meningkatkan modal, kinerja dan produktifitas sektor UKM.

Tabel 5. Perkembangan Pembiayaan BPRS Berdasarkan Golongan Pembiayaan periode 2012-2015

	Periode	Nominal (000.000)	UKM (%)	Non-UKM (%)
2012	Maret	n.a.	n.a.	n.a.
	Juni	n.a.	n.a.	n.a.
	September	n.a.	n.a.	n.a.
	Desember	n.a.	n.a.	n.a.
	Rata-rata	417.282	65,47	34,53
2013	Maret	n.a.	n.a.	n.a.
	Juni	n.a.	n.a.	n.a.
	September	n.a.	n.a.	n.a.
	Desember	n.a.	n.a.	n.a.
	Rata-rata	615.469	61,75	38,25
2014	Maret	679.764	n.a.	n.a.
	Juni	744.743	n.a.	n.a.
	September	865.250	n.a.	n.a.

	Desember	876.921	n.a.	n.a.
	Rata-rata	791.670	64,60	35,40
2015	Maret	951.591	61,43	38,57
	Juni	1.123.027	53,74	46,26
	September	1.247.657	52,99	47,01
	Desember	1.256.610	52,31	47,69
	Rata-rata	1.144.721	55,12	44,88

Sumber: Diolah dari Statistik BPR Syariah periode 2005-2008, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Keterangan:

- UKM = Usaha Kecil dan Menengah
- N-UKM = Non Usaha Kecil dan Menengah

Pembiayaan dan Non Performing Financing (NPFs)

Tabel 6. menunjukkan perkembangan pembiayaan non-lancar (*non-performing financings/NPFs*) BPR Syariah. Rasio *NPFs* merupakan rasio pembiayaan non-lancar (bermasalah) terhadap total pembiayaan. Pembiayaan non lancar adalah penjumlahan pembiayaan yang masuk dalam kategori: (i) kurang lancar, (ii) diragukan dan (iii) macet. Rasio *NPFs* digunakan untuk mengukur seberapa besar potensi kredit bermasalah (macet) yang dialami oleh suatu Bank.

Perkembangan *NPFs* BPR Syariah dari tahun ke tahun menunjukkan angka

yang relatif tinggi. Pada posisi 2015, rata-rata per-triwulan *NPFs* BPR Syariah hanya mencapai 7,65% dengan nilai nominal Rp. 87.553 Juta. Rasio ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah (macet) yang dimiliki BPR Syariah relatif besar. Interpretasinya adalah kemungkinan (probabilitas) BPR Syariah menghadapi kredit bermasalah cukup besar, atau dengan kalimat lain *deposit fund* ditanamkan ke masyarakat, belum berhasil dikembalikan ke BPR Syariah lagi karena hambatan yang berarti. Hal ini menandakan bahwa proyek-proyek produktif yang dibiayai oleh BPR Syariah, belum berhasil dalam meningkatkan kinerjanya.

Tabel 6. Perkembangan Pembiayaan Non Lancar (Non Performing Financings /NPFs) BPR Syariah periode 2012-2015

Periode	<i>NPFs</i> (000.000)	Total Pembiayaan (000.000)	<i>NPFs</i> (%)	
2012	Maret	n.a.	n.a.	
	Juni	n.a.	n.a.	
	September	n.a.	n.a.	
	Desember	n.a.	n.a.	
	Rata-rata	45.501	417.282	10,90
2013	Maret	n.a.	n.a.	
	Juni	n.a.	n.a.	
	September	n.a.	n.a.	
	Desember	n.a.	n.a.	
	Rata-rata	51.096	615.469	8,30
2014	Maret	59.479	679.764	8,75
	Juni	67.846	744.743	9,11
	September	72.854	865.250	8,42
	Desember	70.066	876.921	7,99
	Rata-rata	67.561	791.670	8,57
2015	Maret	74.764	951.591	7,86

Juni	83.774	1.123.027	7,46
September	86.352	1.247.657	6,92
Desember	105.322	1.256.610	8,38
Rata-rata	87.553	1.144.721	7,65

Sumber: Diolah dari Statistik BPR Syariah periode 2012-2015, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Keterangan:

- KL = Kurang Lancar
- R = Diragukan
- M = Macet
-

Tabel 7. menunjukkan perbandingan *NPFs* BPR Syariah dengan *NPFs* total BPR di Indonesia. Angka-angka pada tabel itu menunjukkan bahwa *NPFs* yang dicapai BPR Syariah itu relatif lebih kecil, jika dibandingkan dengan *NPFs* yang dicapai Total BPR yang mencapai sebesar 9,68% pada posisi Oktober 2015, hal ini bisa diinterpretasikan bahwa kemungkinan BPR konvensional menghadapi kredit bermasalah lebih besar daripada BPR

Syariah. Namun rasio *NPFs* BPR Syariah juga masih lebih besar dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aset yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar < 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio *NPFs* yang dicapai BPR Syariah dapat dikategorikan dalam kelompok berkinerja kurang baik (belum sehat) terkait dengan pembiayaan yang diberikan.

Tabel 7. Perbandingan *NPFs* BPRS dengan *NPFs* Total BPR

		<i>NPFs</i> (%)
Oktober 2015	Bank Syariah	8,22
	Total BPR	9,68

Sumber: Diadaptasi dari Statistik BPR Syariah periode 2005-2008, Direktorat BPR Syariah Bank Indonesia

Hasil Analisis Regresi

Sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis bahwa BBM, tariff listrik dan upah berpengaruh terhadap *NPL*. Pengujian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BBM, tariff listrik dan upah terhadap *NPL*. Adapun hasil pengujian tersebut diringkas dalam tabel 8.

Tabel 8. Hasil Pengujian Regresi

Parameter	Koef. Regresi	Beta	t-Statistik	<i>p-value</i>
Konstansta	1.287		2,810	0,002
BBM	0,146	0,175	1,614	0,085*
Tarif Listrik	0,328	0,409	3,758	0,250
Upah	0,176	0,283	1,683	0,846

F-statistik = 68,541

Signifikansi F = 0,095*

R-squared = 0,645

*signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: diringkas dari lampiran

Berdasarkan hasil regresi maka dapat disusun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$NPF = 1.287 + 0,146BBM + 0,328TL + 0,176Up + \delta$$

$$SE \quad (1.764) \quad (0.062) \quad (0.075) \quad (0.105)$$

Untuk menguji apakah model tersebut merupakan prediktor yang tepat (*goodness of fit*) digunakan uji F dan R^2 . Sedangkan untuk menguji apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut secara statistik signifikan atau tidak, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t . Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa $R^2 = 0,645$ (64,5%) artinya variasi NPF dijelaskan oleh variasi BBM , tarif listrik dan upah sebesar 64,5% sedangkan sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh variabel lain. Sementara hasil uji signifikansi F , karena p -value (F sig – 0,000) < 0,1, maka dapat diinterpretasikan bahwa BBM , tarif listrik dan upah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap NPF .

Berdasarkan uji R^2 dan signifikansi F dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model prediktor yang *fit* (tepat). Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan NPF pada level signifikansi 10%.

Sebagaimana nampak pada tabel 4.12. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan t -value-nya sebesar 1,614 (p -value = 0.085) dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa BBM berpengaruh secara signifikan (berhasil menolak H_0) terhadap NPF . Sementara, arah pengaruhnya adalah negatif yang ditunjukkan dengan koefisien regresi BBM sebesar -0,146, artinya semakin tinggi harga BBM , maka semakin rendah probabilitas BPR Syariah mengalami kredit bermasalah. Dengan demikian analisis hasil regresi ini mendukung pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa BBM berpengaruh secara signifikan terhadap NPF . Sementara

untuk hipotesis yang ke-dua dan ketiga tidak terbukti secara statistik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Untuk mencapai tujuan yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, diperlukan langkah-langkah strategis yaitu mendesain (menyusun) metode penelitian, mengolah data dan menganalisis hasil serta pembahasannya, sehingga sampai pada beberapa poin simpulan sebagai berikut:

1. Dalam empat tahun terakhir, Pembiayaan yang diberikan BPR Syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun *share*-nya terhadap total BPR di Indonesia masih sangat kecil atau belum menunjukkan pertumbuhan yang pesat.
2. Dalam empat tahun terakhir kredit yang paling besar disalurkan BPR Syariah pada skim pembiayaan piutang murabahah dan terkecil piutang ijarah. Hal ini bisa diprediksikan bahwa di tahun-tahun yang akan datang komposisi pembiayaan BPR Syariah tidak banyak berubah.
3. BPR Syariah belum memberikan kontribusi yang optimal dalam menggerakkan investasi di Indonesia, bahkan ada kecenderungan *share* pembiayaan untuk konsumsi terus bergerak cepat di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia lebih berminat meminjam dana di BPR Syariah untuk membelanjakan konsumsi daripada membiayai proyek-proyek produktif investasi-nya.
4. BPR Syariah memberikan kontribusi relatif besar dalam menggerakkan sektor riil di Indonesia melalui kredit yang digunakan untuk meningkatkan modal, kinerja dan produktifitas sektor UKM.
5. Kemungkinan BPR konvensional menghadapi kredit bermasalah lebih besar daripada BPR Syariah. Rasio NPF s BPR Syariah juga lebih kecil dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aset yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar < 5%. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa rasio *NPFs* yang dicapai Perbankan Syariah dapat dikategorikan dalam kelompok berkinerja baik (sehat) terkait dengan pembiayaan yang diberikan.

Secara metodologi, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

- (1) Penelitian ini tidak bisa menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pangsa (*share*) *asset*, *deposit fund* dan *financing extended* BPR Syariah sangat kecil, jika dibandingkan dengan total Perbankan;
- (2) Penelitian ini belum bisa menjelaskan bagaimana hubungan *Non-Performing Financings (NPFs)* dengan efektifitas pembiayaan proyek-proyek produktif di lapangan serta faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya *NPFs*;
- (3) Penelitian ini belum bisa menjelaskan bagaimana hubungan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dengan efektifitas fungsi Bank sebagai lembaga *intermediary* serta faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya *FDR*; dan
- (4) Perkembangan pembiayaan, *deposit fund*, *asset*, *NPFs* dan *FDR* hanya diamati dan analisis dengan metode *compare* dari triwulan ke triwulan berikutnya dalam lima tahun terakhir, tanpa memasukan analisis statistik baik deskriptif maupun inferensial.

Saran Penelitian Selanjut-nya

Saran yang bisa dilakukan untuk penyempurnaan penelitian ini, bagi peneliti berikutnya adalah:

- (1) Penelitian lanjutan sebaiknya didesain pada upaya menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kecilnya *share* BPR Syariah terhadap total Bank;
- (2) Penelitian berikutnya sebaiknya menemukan jawaban faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi-rendahnya *NPFs*, serta kaitannya proyek-proyek produktif.
- (3) Penelitian lanjutan sebaiknya juga mengarah pada upaya mengetahui hubungan antara *FDR* dengan efektifitas Bank sebagai lembaga *intermediary*.
- (4) Kemungkinan dimasukkan analisis statistik dalam desain penelitian

berikutnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2001), "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek". Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia. Jakarta.
- Budisantoso, T. dan Triandaru, S. (2006), "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", Salemba Empat. Jakarta
- Direktorat Perbankan Syariah BI (2008), "Statistik Perbankan Syariah". <http://www.bi.co.id/>
- Hartono, J. (2004), "Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman". BPFE-UGM. Jogjakarta
- Ismal, R. (2008), "Syariah Untuk Kelebihan Likuiditas", *Opini Republika*. PT Republika Mandiri. Jakarta
- Karim, A.A. (2008), "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", Edisi Ketiga. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Karim, A.A. (2008), "Momentum Emas Perbankan Syariah", *Opini Republika*. PT Republika Mandiri. Jakarta
- Lewis, M.K. dan AlGaoud, L.M. (2007), "Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek". PT Serambi Ilmu Semesta. Jakarta
- Makmun (2008), "Tantangan Perbankan Syariah", *Opini Republika*. PT Republika Mandiri. Jakarta
- Muhammad (2004), "Dasar-Dasar Keuangan Islami". Edisi Pertama. EKONISIA FE-UII. Yogyakarta
- Sekaran, U. (2006), "Metodologi Untuk Bisnis". Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta.